

PERSEPSI PEMILIH TERHADAP KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024 (Studi Kasus di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat)

Asep Budiawan¹, Siti Mariah Almaidah², Sisri Widayanti³, Ai Yuni Fitriani⁴, Rakhmi Putri Nabilla⁵
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional
Email: asep.budiawan@iwu.ac.id¹, alma.almaida2807@gmail.com², sisri@gmail.com³, aiyuni@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan persepsi pemilih di Kecamatan Gununghalu terhadap kandidat perempuan dalam Pemilihan Umum 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai kehadiran perempuan dalam kontestasi politik serta faktor-faktor yang memengaruhi pandangan tersebut. Teori yang digunakan adalah pendekatan persepsi ekologis yang dikembangkan oleh James Gibson yang menekankan pada bagaimana lingkungan sosial membentuk persepsi individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan terdiri dari empat orang dengan latar belakang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan keterlibatan politik yang berbeda. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi untuk menjamin akurasi dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Gununghalu masih memegang nilai-nilai tradisional, mereka tidak secara mutlak menolak kepemimpinan perempuan. Persepsi terhadap kandidat perempuan dapat berubah seiring kemunculan figur yang mampu membangun citra positif dan menjalin komunikasi efektif dengan warga. Namun, pengaruh budaya patriarkal masih menjadi tantangan, terutama karena tekanan normatif dari tokoh adat dan agama. Temuan ini memperkuat argumen bahwa persepsi pemilih merupakan hasil dari interaksi kompleks antara isyarat sosial, nilai budaya, dan struktur sosial. Dengan demikian, untuk mendorong keterwakilan politik yang lebih adil dan setara diperlukan upaya kolektif melalui edukasi politik, peningkatan literasi gender, serta penguatan peran perempuan dalam ruang publik.

Kata Kunci: : Presepsi Pemilih; Kandidat Perempuan; Pemilihan Umum; Gender dan Politik.

ABSTRACT

This study aims to examine and describe the perceptions of voters in Gununghalu Sub-district towards female candidates in the 2024 General Election. The main focus of this research is to understand how people interpret the presence of women in political contestation and the factors that influence these views. The theory used is the ecological perception approach developed by James Gibson which emphasizes how the social environment shapes individual perceptions. This research uses qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews and documentation. The informants consisted of four people with different ages, genders, education levels, and political involvement. Data validity was tested through triangulation techniques to ensure the accuracy and credibility of the information obtained. The results showed that although the Gununghalu community still holds traditional values, they do not absolutely reject female leadership. Perceptions of female candidates can change with the emergence of figures who are able to build a positive image and establish effective communication with citizens. However, the influence of patriarchal culture remains a challenge, especially due to normative pressure from traditional and religious leaders. These findings reinforce the argument that voter perceptions are the result of complex interactions between social cues, cultural values, and social structures. Thus, to encourage fairer and more equal political representation, collective efforts are needed through political education, increasing gender literacy, and strengthening the role of women in the public sphere.

Keywords: *Voters' Perceptions; Women Candidates; General Elections; Gender and Politics*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap pemerintahan yang terbentuk, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, yang mencerminkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah unsur yang esensial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Keterlibatan masyarakat ini bukan hanya sebagai pemilih pasif, melainkan sebagai bagian dari proses demokratis yang aktif dan reflektif terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, kualitas partisipasi pemilu tidak hanya dapat diukur dari kuantitas kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (*voter turnout*), tetapi juga dari sejauh mana pemilih memahami, merespons, dan terlibat dalam dinamika politik yang lebih luas termasuk dalam konteks representasi dan keterwakilan kelompok tertentu seperti perempuan (Lengkoan *et al.*, 2022)

Kesetaraan gender dalam politik tidak hanya menyangkut prinsip keadilan, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan publik yang inklusif. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam politik diyakini dapat mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Namun, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan baik secara struktural maupun kultural. Konstruksi sosial dan stereotip gender yang menganggap perempuan sebagai sosok emosional, tidak rasional, dan tidak layak memimpin, masih menjadi faktor dominan yang menghambat perempuan untuk masuk dan diterima dalam ruang politik. Pandangan ini memosisikan politik sebagai ruang publik yang maskulin, yang hanya cocok untuk laki-laki sementara perempuan dianggap lebih tepat berada di ranah domestik. Akibatnya, tidak hanya masyarakat umum tetapi juga partai politik cenderung enggan memberi ruang strategis bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik (Adriani & Maulia, 2024).

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen terhadap keterwakilan perempuan melalui kebijakan afirmatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ketentuan bahwa partai politik wajib mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Ketentuan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kuota secara administratif, tetapi juga untuk memastikan agar sistem politik menjadi lebih inklusif terhadap kepentingan perempuan (Rohmah *et al.*, 2025). Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Dalam Pemilu 2024 misalnya, keterwakilan perempuan hanya mencapai sekitar 22% yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan realitas politik. Rendahnya capaian ini mencerminkan belum terkonsolidasinya kekuatan politik perempuan, serta bias budaya yang masih kuat dalam memengaruhi preferensi pemilih (Suciptawati *et al.*, 2020). Dominasi laki-laki dalam politik Indonesia yang masih sangat kuat serta menjadi salah satu penyebab utama rendahnya keterwakilan perempuan. Tantangan ini diperburuk oleh masih adanya

pandangan seksis dari sebagian pemilih yang membuat peluang perempuan untuk terpilih semakin kecil. Di sisi lain, partai politik sering kali menerapkan standar rekrutmen yang dianggap objektif dan ideal namun justru menghambat partisipasi perempuan. Rendahnya persentase perempuan juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman partai terhadap pentingnya representasi gender serta adanya resistensi dari rekan laki-laki yang melihat perempuan sebagai pesaing dalam kompetisi politik (Aulya, 2022).

Kondisi ini semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif daerah. Kecamatan Gununghalu, salah satu wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung Barat, merupakan contoh nyata dari tantangan representasi perempuan dalam politik lokal. Meski secara nasional kesetaraan gender terus mengalami kemajuan, nilai-nilai patriarkal masih sangat kental di daerah-daerah dengan tradisi sosial yang kuat (Kushandajani *et al.*, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan adat istiadat di Gununghalu masih memengaruhi cara masyarakat memandang kepemimpinan, termasuk dalam konteks pemilu. Keterlibatan kandidat perempuan dalam Pemilu 2024 di wilayah ini masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan belum terbentuknya kepercayaan publik terhadap figur perempuan dalam posisi kepemimpinan, serta minimnya pengalaman kolektif masyarakat berada di bawah kepemimpinan perempuan. Berdasarkan kondisi ini, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan di daerah dengan karakteristik budaya yang konservatif.

Penelitian ini menggunakan teori persepsi ekologis yang dikembangkan oleh James J. Gibson (1979). Gibson memandang bahwa persepsi berlangsung secara langsung tanpa melalui proses kognitif yang kompleks. Individu mampu menangkap informasi dari lingkungan sosial melalui isyarat-isyarat visual dan sosial yang tersedia secara kasat mata. Gibson memperkenalkan konsep *affordances*, yaitu peluang bertindak yang ditawarkan oleh lingkungan kepada individu tertentu. Dalam konteks pemilu, pemilih membentuk persepsi terhadap kandidat perempuan berdasarkan isyarat sosial yang dapat diamati langsung, seperti gaya komunikasi, penampilan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh (Van Dijk & Kiverstein, 2021). Persepsi sosial juga sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Di masyarakat kolektif yang menjunjung tinggi empati dan solidaritas, kecenderungan untuk menerima kelompok rentan seperti perempuan akan lebih tinggi. Dengan demikian, persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan di Kecamatan Gununghalu dapat dibentuk oleh kombinasi antara isyarat sosial langsung dan konstruksi budaya lokal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari (Rahel Putriani *et al.*, 2024).

Temuan-temuan dari penelitian terdahulu turut memperkuat pentingnya analisis terhadap persepsi pemilih. Siti Hafisah (2018) dalam penelitiannya terhadap pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo, menemukan bahwa meskipun sebagian besar responden mengakui kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, masih terdapat pandangan konservatif yang menolak perempuan menjadi kepala daerah karena alasan religius. Pemilih pemula lebih cenderung menganggap perempuan hanya layak sebagai wakil kepala daerah, bukan sebagai pemimpin utama. Sementara itu, studi oleh Ni Luh Putu *et al.*, (2020) terhadap pemilih pemula di Kota Denpasar mengungkap bahwa dari 300 responden, hanya

65 yang memilih calon legislatif perempuan. Faktor pendidikan dan pengalaman berorganisasi menjadi aspek utama yang memengaruhi persepsi pemilih, menandakan bahwa persepsi politik sangat bergantung pada konteks sosial dan pengalaman individu.

TINJAUAN LITERATUR

Feminisme Politik

Feminisme sebagai kerangka analisis muncul pada abad ke-19 di Barat, dengan istilah "feminisme" pertama kali digunakan sekitar tahun 1880 untuk memperjuangkan kesetaraan hukum dan politik antara perempuan dan laki-laki. Kajian tentang perempuan dan politik menyoroti pentingnya kebebasan perempuan dalam berpartisipasi politik dan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa upaya negara melalui undang-undang politik sebagai bentuk afirmasi positif belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik (Sastrawaty *et al.*, 2023). Bagi politisi perempuan, politik bukan lagi hanya tentang perebutan kekuasaan, melainkan sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama perempuan. Perempuan dapat berpartisipasi dalam politik dengan percaya diri, karena kemampuan dan pengalaman mereka setara dengan laki-laki. Pemahaman dan pemaknaan politik perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman organisasi, profesi, dan kesadaran akan hak-hak perempuan, bukan faktor seperti pendidikan atau status perkawinan. Pengalaman ini membentuk "*strong objectivity*" yang mendorong politisi perempuan untuk aktif berkontribusi dalam dunia politik (Victorya Pandiangan, 2017).

Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 20,8%, dengan 120 dari 575 anggota legislatif perempuan. Banyak di antara mereka yang berasal dari dinasti politik. Pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai sekitar 22%, meningkat dari 20,5% pada 2019. Namun, angka ini masih belum mencapai target 30% yang ditetapkan oleh undang-undang. Pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen karena dapat menghasilkan keputusan politik yang lebih inklusif dan mendukung demokrasi yang lebih kuat, serta mendorong perundang-undangan yang pro terhadap perempuan dan anak (Sastrawaty *et al.*, 2023). Menurut Fadhli (2014) Gerakan perempuan di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penerapan nilai-nilai *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, seiring dengan proses desentralisasi politik yang memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Representasi Politik

Representasi politik yang demokratis hanya terjadi ketika kelompok masyarakat yang terdampak oleh suatu keputusan memiliki kemampuan untuk terlibat dan memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Keterlibatan ini mencerminkan adanya partisipasi politik yang aktif yang seharusnya berlangsung secara terus-menerus, baik selama proses pemilu maupun setelahnya

ketika wakil rakyat menjalankan mandatnya. Dalam praktiknya, pemilu menjadi sarana utama untuk menghadirkan kepentingan dan identitas politik, namun pilihan-pilihan yang tersedia sering kali terbatas pada platform, visi-misi, dan program yang telah dirumuskan oleh elite partai politik atau kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan kepentingan lebih banyak bersifat *top-down*, dimana elite menentukan isu-isu yang dianggap penting, bukan hasil dari proses partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat secara *bottom-up*. Akibatnya, rakyat lebih banyak berperan sebagai penerima tawaran kepentingan, bukan sebagai perumus utama dari kepentingan politik yang hendak diperjuangkan (Ardiansa, 2016).

Secara umum, teori representasi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana makna budaya diciptakan, dikomunikasikan, dan dipertahankan dalam masyarakat melalui simbol, tanda, dan gambar. Representasi ini tidak hanya membentuk pemahaman terhadap dunia, tetapi juga memengaruhi persepsi, identitas, serta relasi sosial. Dalam studi budaya, representasi memiliki peran yang signifikan karena makna tidak hadir begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses mental dan bahasa yang saling berkaitan. Pemikiran manusia merepresentasikan makna melalui penggunaan simbol-simbol tertentu, baik dalam bentuk visual maupun linguistik. Proses ini mencakup bagaimana makna dikodekan oleh pihak pembuat representasi melalui pemilihan dan pengemasan pesan tertentu ke dalam simbol yang dapat diterima masyarakat. Dalam konteks politik, representasi juga menjadi penting ketika membicarakan partisipasi perempuan dalam ranah elektoral, mengingat rendahnya tingkat keterwakilan mereka dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan seperti legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong wacana tentang representasi politik perempuan sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan adil (Indah Mar'atus Sholichah *et al.*, 2023).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya representasi politik perempuan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah kuatnya budaya patriarki, di mana secara historis perempuan dianggap kurang layak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, baik di ruang publik maupun privat. Ketimpangan peran sosial antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan perempuan cenderung terpinggirkan dari arena politik formal dan lebih diarahkan pada peran domestik. Kondisi ini menciptakan hambatan struktural maupun psikologis bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Selain aspek kultural, hambatan institusional juga menjadi faktor penting, dimana berbagai regulasi dan struktur sosial-politik masih mendiskriminasi perempuan serta membatasi ruang gerak mereka dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, penting untuk mendorong terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dengan meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal. Kesadaran ini telah melahirkan berbagai gerakan sosial-politik berbasis identitas perempuan di banyak negara, yang menuntut diakhirinya dominasi laki-laki dalam politik dan mendorong kebijakan afirmatif seperti kuota gender atau alokasi kursi khusus

(*reservation seats*) untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik elektoral (Niron & Seda, 2020).

Persepsi Ekologis

Teori persepsi ekologis yang dikembangkan oleh James J. Gibson (1979) memberikan kerangka penting dalam memahami bagaimana individu menangkap informasi dari lingkungannya secara langsung. Gibson menolak pandangan bahwa persepsi harus selalu dimediasi oleh proses kognitif kompleks atau representasi mental. Sebaliknya, ia mengemukakan bahwa manusia mampu menangkap informasi secara intuitif melalui lingkungan, karena lingkungan itu sendiri telah menyediakan informasi yang cukup untuk dipahami secara langsung. Konsep kunci dalam teori ini adalah *affordances*, yaitu peluang-peluang untuk bertindak yang ditawarkan oleh suatu objek atau lingkungan kepada pengamat tertentu (Van Dijk & Kiverstein, 2021). Dalam konteks politik, *affordances* dapat dimaknai sebagai isyarat sosial yang ditampilkan oleh figur kandidat, seperti ekspresi wajah, cara berpakaian, bahasa tubuh, gaya komunikasi, atau simbol-simbol visual lainnya. Pemilih dapat menangkap isyarat-isyarat ini secara cepat dan membentuk persepsi berdasarkan informasi yang kasat mata tersebut. Artinya, keputusan politik tidak selalu dilandasi oleh proses penilaian rasional atau analisis mendalam, melainkan bisa dibentuk oleh persepsi spontan terhadap citra kandidat yang tertangkap dalam interaksi sosial atau melalui media.

Konteks sosial dan budaya lokal menjadi penentu penting bagi cara *affordances* itu ditafsirkan. Seperti yang dijelaskan oleh Putriani *et al.* (2024), nilai-nilai kolektivitas seperti empati dan solidaritas dalam masyarakat dapat membuka ruang penerimaan yang lebih besar terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan. Jika *affordances* yang ditampilkan oleh kandidat perempuan selaras dengan nilai-nilai tersebut, maka kemungkinan penerimaan oleh pemilih akan meningkat. Sebaliknya, jika persepsi publik masih dibingkai oleh stereotip gender tradisional, *affordances* yang ditampilkan perempuan justru dapat diinterpretasikan secara negatif. Tidak hanya itu, pendekatan etika politik juga menjadi relevan dalam melihat bagaimana persepsi terhadap kandidat dibentuk oleh harapan moral masyarakat. Menurut Haryanti & Artikel (2024), pemilih cenderung menyukai figur politik yang mencerminkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Jika *affordances* yang ditampilkan oleh seorang kandidat mampu merefleksikan nilai-nilai tersebut, maka besar kemungkinan persepsi publik akan lebih positif, meskipun terdapat hambatan sosial atau stereotip yang menyertai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan realitas sosial partisipan melalui metode seperti observasi, wawancara serta analisis

konten. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan situasi secara utuh dan kontekstual tanpa adanya intervensi langsung terhadap subjek yang diteliti (Yıldırım *et al.*, 2025). Penelitian dengan menggunakan kualitatif deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan persepsi pemilih di Kecamatan Gununghalu terhadap kandidat perempuan dalam pemilihan umum serta faktor yang mendukung atau yang menolak kandidat perempuan dalam pemilu.

Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa individu-individu tersebut memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan yang relevan dengan tema penelitian yakni persepsi terhadap kandidat perempuan dalam kontestasi politik. Pemilihan subjek dilakukan dengan mengacu pada kemampuan informan untuk memberikan data yang mendalam, khususnya terkait pandangan mereka terhadap peran perempuan dalam kontestasi politik menjelang Pemilu 2024 di Kecamatan Gununghalu. Subjek yang diwawancarai mencerminkan keberagaman latar belakang sosial, usia, jenis kelamin, serta keterlibatan dalam aktivitas politik atau kepemiluan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang lebih kaya dan menyeluruh mengenai bagaimana masyarakat, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari struktur politik lokal, memandang keberadaan dan potensi kandidat perempuan. Dalam konteks sosial budaya yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan patriarkal, pandangan dari berbagai kelompok masyarakat menjadi penting untuk memahami secara lebih utuh tantangan maupun peluang yang dihadapi oleh perempuan dalam politik lokal. Berdasarkan data KPU, terdapat sejumlah 58.898 orang daftar pemilih tetap di Gununghalu. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Kelly (2010), *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan responden secara sengaja dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian (Campbell *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini terdapat 4 informan dengan kriteria pemilihan informan yakni WNI, memiliki hak pilih, terdaftar di DPT pada Pemilihan Umum 2024 di Gununghalu, aktif di kegiatan atau organisasi sosial dan bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Teknik Pengumpulan data menggunakan dua metode, teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semistruktur untuk menggali persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan dalam pemilu. Selain wawancara, teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan penguat data. Dokumentasi mencakup pengumpulan data berupa catatan lapangan, rekaman, foto kegiatan serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses wawancara dan konteks penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis interaktif. Analisis interaktif adalah proses yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dimana peneliti mulai merangkum, menyusun, dan memilih data yang penting sejak awal. Peneliti memutuskan apa yang perlu ditampilkan, dihubungkan, dan dijelaskan, sambil terus mengembangkan pemahaman atas makna dari data tersebut (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1994).

Verifikasi dilakukan guna menilai sejauh mana data tersebut valid dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik keabsahan data yang dikenal

sebagai triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam studi kualitatif untuk menguji validitas data melalui penggabungan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda. Menurut Carter *et al.* (2014), triangulasi dapat meningkatkan keakuratan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan meminimalkan bias yang mungkin timbul jika hanya menggunakan satu metode tunggal. Dalam konteks penelitian ini, teknik triangulasi diterapkan dengan menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*). Kedua metode tersebut saling melengkapi dalam menggali informasi yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai isu yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Presepsi Pemilih terhadap Kandidat Perempuan

Pertama, Pendapat umum tentang perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah. Di Kecamatan Gununghalu sebagian besar pemilih menunjukkan penerimaan positif terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah. Mereka memandang bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam ranah pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan, Dikin (30 tahun) menyatakan bahwa:

“Menurut saya, tidak ada masalah sama sekali kalau perempuan mencalonkan diri jadi anggota legislatif atau kepala daerah. Perempuan punya hak yang sama seperti laki-laki dalam hal berpolitik. Selama dia mempunyai kemampuan, niat baik dan mau bekerja untuk masyarakat kenapa tidak.” (wawancara Kamis, 5 Juni 2025).

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Desi (28 Tahun) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mencalonkan diri termasuk perempuan karena pada dasarnya perempuan pun memiliki hak yang sama dalam menentukan peran dan keterlibatannya dalam dunia politik. Dari perspektif pemilih pemula, terdapat kecenderungan penerimaan yang semakin terbuka dimana pemilih pemula memandang bahwa perempuan tidak hanya memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki tetapi juga memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk memimpin. Bagi mereka perubahan sosial dan perkembangan zaman telah mendorong pergeseran cara pandang terhadap peran perempuan dalam politik dimana tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif laki-laki. Sebagaimana diungkapkan oleh Noviyanti (19 Tahun):

“Saya setuju karena perempuan juga mempunyai hak dan kemampuan untuk memimpin. Sekarang zamannya sudah berubah, tidak hanya laki-laki yang bisa jadi pemimpin. Di wilayah saya dulu pernah ada calon perempuan juga walaupun belum menang tetapi pendukungnya sudah cukup banyak.” (Wawancara Senin, 9 Juni 2025)

Selanjutnya dari perspektif gender, M. Rifki Saepulloh (30 tahun) berpendapat bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dipandang sebagai suatu hal wajar selama didasarkan pada kemampuan dan kapabilitas individu. Menurutnya dalam proses pencalonan yang paling utama adalah sejauhmana calon tersebut memiliki kapasitas, bukan semata-mata persoalan jenis kelamin. Informan bahkan menambahkan, apabila dibandingkan dengan laki-laki yang tidak mumpuni, lebih baik perempuan yang mumpuni menjadi wakil rakyat. Lebih lanjut, informan juga menyoroti peran organisasi keagamaan dalam proses pembinaan kader perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU dan IPPNU yang secara khusus memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kader perempuan dalam kepemimpinan telah berlangsung sejak dini bahkan dilingkungan sosial keagamaan.

Kedua, kriteria penilaian terhadap kandidat perempuan. Dalam proses pengambilan keputusan politik, penilaian terhadap kandidat perempuan tidak berlangsung secara sederhana melainkan melibatkan sejumlah dimensi yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, setidaknya terdapat empat aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat dalam menilai kandidat perempuan, yaitu: penampilan, gaya komunikasi, rekam jejak kinerja, serta karakter dan visi-misi. Aspek pertama yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah penampilan fisik. Penampilan menjadi kesan awal yang secara kasat mata dinilai oleh pemilih ketika pertama kali mengenal kandidat. Dalam pandangan Desi (28 tahun), penampilan memang menjadi perhatian awal sebelum publik menilai aspek-aspek lainnya. Ia menyatakan:

"Biasanya yang pertama kali dilihat itu penampilannya dulu, setelah itu baru cara bicaranya, bagaimana gaya komunikasinya saat berbicara dengan warga."(Wawancara Sabtu, 7 Juni 2025).

Selain penampilan, gaya komunikasi juga menempati posisi penting dalam kriteria penilaian. Gaya berbicara yang santun, ramah, serta kemampuan membangun kedekatan dengan warga dipandang sebagai indikator keterbukaan kandidat dalam merespons aspirasi masyarakat. Pandangan ini disampaikan pula oleh Noviyanti (19 tahun), seorang pemilih pemula yang mengungkapkan:

"Biasanya masyarakat lihat cara bicaranya, apakah sopan dan bisa dekat dengan warga. Penampilan juga kadang diperhatikan, tapi bukan soal cantik atau tidak, lebih ke cara berpakaian dan sikapnya. Kalau ramah dan tidak sombong, biasanya lebih diterima." (Wawancara Senin, 9 Juni 2025)

Para informan juga menekankan pentingnya rekam jejak kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Bagi sebagian pemilih, aspek ini justru menjadi pertimbangan utama yang menentukan akhir dari pilihan politik mereka. M. Rifki Saepulloh (30 tahun) menegaskan:

"Kalau untuk saya pribadi penampilan dan gaya bicara memang menjadi penilaian. Tapi lebih sangat bernilai rekam jejak dari kandidat perempuan tersebut.

Karena percuma kalau terlalu banyak bicara tetapi kerjanya tidak nyata."

(Wawancara Selasa, 10 Juni 2025)

Karakter pribadi serta visi-misi yang diusung kandidat juga turut menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Dikin (30 tahun) menyoroti pentingnya akhlak, etika pribadi, serta arah kebijakan yang jelas dari kandidat. Ia menyatakan:

"Lebih melihat karakter pada kandidat, sopan santun, dan visi misi."

(Wawancara Kamis, 5 Juni 2025)

Karakter pribadi dianggap sebagai cerminan integritas dan tanggung jawab moral kandidat dalam menjalankan amanah publik. Sementara itu, kejelasan visi-misi dipandang sebagai indikator keseriusan kandidat dalam menyusun program kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ketiga, apakah adat istiadat, budaya lokal dan tradisi di kecamatan gununghalu mempengaruhi cara masyarakat memilih kandidat perempuan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, adat-istiadat, budaya lokal serta tradisi keagamaan masih memegang peranan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan termasuk dalam hal memilih kandidat perempuan. Budaya patriarki yang telah mengakar lama struktur sosial seringkali menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam kepemimpinan baik di ranah domestik maupun publik. Sebagian informan mengakui bahwa pengaruh budaya patriarki masih terasa, meskipun kecenderungannya mulai mengalami pergeseran. Desi (28 tahun) menyatakan:

"Mempengaruhi karena stigma masyarakat yang masih patriarki, tetapi untuk sekarang perempuan banyak yang mematahkan stigma tersebut dan lebih berani untuk turun ke politik."

Dikin (30 tahun) juga mengakui bahwa budaya patriarki masih mempengaruhi sebagian masyarakat. Ia menyatakan secara singkat:

"Mungkin sebagian masih terpengaruhi, karena budaya masyarakat yang patriarki."

Dari sudut pandang pemilih pemula, Noviyanti (19 tahun) memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait bagaimana generasi muda menilai pengaruh adat dalam keterlibatan perempuan di politik. Ia mengungkapkan:

"Memang masih ada anggapan kalau perempuan sebaiknya di rumah saja, apalagi dari orang-orang yang lebih tua. Tapi sekarang, banyak juga yang mulai terbuka pikirannya. Selama tokoh perempuan itu punya niat baik dan kerja nyata, masyarakat lama-lama bisa terima. Walau kadang masih ada tekanan halus dari tokoh adat atau agama, tapi saya rasa semakin ke sini makin berkurang."

M. Rifki Saepulloh (30 tahun) mencoba mengaitkan antara norma agama dan budaya lokal dengan realitas politik kontemporer. Ia menegaskan bahwa kendati dalam ajaran Islam laki-laki disebutkan

sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun dalam ranah politik, perempuan tetap memiliki ruang yang setara. Ia menyampaikan:

"Tentang adat kebiasaan di daerah kita lebih cenderung memiliki laki-laki karena dalam Al-Qur'an pun disebutkan laki-laki pemimpin perempuan. Tapi beda lagi dalam politik karena dulu Siti Khadijah juga menjadi pelopor kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Begitupun di kita saat ini, tidak ada perbedaan pemimpin perempuan atau pun laki-laki karena yang terpenting adalah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya."

Harapan terhadap Kandidat Perempuan

Dalam wawancara dengan para informan muncul berbagai harapan yang disampaikan masyarakat terkait sosok kandidat perempuan yang ideal dalam memimpin. Secara umum, informan menekankan pentingnya kepekaan sosial, kepedulian, serta kemampuan kandidat perempuan dalam memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam, terutama dalam isu-isu yang menyentuh kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan keluarga kecil. Desi (27 tahun) menekankan pentingnya sensitivitas dan empati yang dimiliki oleh pemimpin perempuan, ia mengungkapkan:

"Harapannya pemimpin perempuan itu bisa lebih peka, peduli, dan punya perasaan terhadap kondisi masyarakat, apalagi untuk masalah perempuan dan anak-anak, karena perempuan biasanya lebih mengerti hal-hal seperti itu."

Noviyanti (19 tahun) menyoroti harapan agar pemimpin perempuan mampu memberikan perhatian lebih pada isu-isu kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan:

"Harapannya, dia lebih perhatian pada masalah pendidikan, kesehatan, dan bantuan untuk keluarga kecil. Saya juga harap perempuan pemimpin bisa lebih sabar dan peduli, karena biasanya perempuan lebih peka sama kebutuhan masyarakat."

Didin (30 tahun) menambahkan bahwa pemimpin perempuan diharapkan tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga mampu memimpin secara adil, jujur, serta bijak dalam pengambilan keputusan. Ia menuturkan:

"Mungkin harapan saya terhadap pemimpin perempuan bisa memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberi kesempatan yang sama bagi semua, juga pemimpin perempuan yang mempunyai rasa peduli, jujur, dan bijak dalam mengambil keputusan."

M. Rifki Saepulloh (30 tahun) menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin, tanpa membedakan apakah pemimpin itu perempuan atau laki-laki. Baginya, orientasi utama dari kepemimpinan adalah kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia menyampaikan:

"Saya hanya ingin mempunyai pemimpin yang jujur, amanah dan mengerti bertanggung jawab mengurus rakyat sesuai mandatnya. Karena seorang

pemimpin di pundaknya terdapat beban untuk mensejahterakan masyarakatnya ya. Apalagi di pelosok-pelosok daerah seperti daerah kita.”

Pembahasan

Penelitian ini menggambarkan bagaimana persepsi pemilih di Kecamatan Gununghalu terhadap kandidat perempuan dalam Pemilu 2024 terbentuk melalui interaksi sosial dan pengaruh budaya lokal yang masih cukup kuat. Secara umum, mayoritas informan dalam penelitian ini menunjukkan pandangan yang positif terhadap kehadiran perempuan sebagai calon pemimpin, baik dalam posisi anggota legislatif maupun kepala daerah. Mereka menilai bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik selama memiliki kompetensi, kepedulian terhadap masyarakat, serta visi yang jelas. Pandangan ini mengindikasikan adanya pergeseran cara pandang masyarakat, khususnya di kalangan pemilih pemula yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam ruang publik.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan di Gununghalu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara isyarat sosial yang tampak secara kasat mata dan nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Pemilih cenderung menilai kandidat perempuan berdasarkan tanda-tanda visual dan perilaku yang mudah dikenali, seperti penampilan fisik yang rapi, gaya komunikasi yang santun, ekspresi wajah yang ramah, serta pola interaksi sosial yang dinilai sopan dan bersahabat. Isyarat-isyarat ini menjadi semacam “petunjuk cepat” (*social cues*) yang digunakan oleh pemilih dalam membentuk impresi awal, tanpa melalui proses penilaian rasional yang mendalam. Akan tetapi, persepsi tersebut tidak terbentuk dalam ruang yang netral. Budaya patriarki yang masih dominan khususnya di kalangan generasi tua. Meskipun kandidat perempuan menunjukkan kualitas personal dan profesional yang mumpuni, tetap terdapat kecenderungan untuk menilai bahwa laki-laki lebih pantas menduduki posisi kepemimpinan karena dianggap lebih “wajar” atau “alami” dalam memegang otoritas publik. Hal ini memperlihatkan bagaimana persepsi politik terhadap perempuan dibentuk bukan semata oleh kapasitas individu, melainkan juga oleh struktur nilai yang bersifat kolektif. Namun demikian, adanya pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Kelompok ini mulai menunjukkan kecenderungan untuk menilai kandidat secara lebih objektif dengan mempertimbangkan aspek kapasitas, komitmen, dan integritas, tanpa terjebak pada stereotip gender. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap kepemimpinan perempuan, terutama jika kandidat tersebut mampu menampilkan citra yang kompeten dan aspiratif. Hal ini mencerminkan bahwa persepsi politik bersifat dinamis dan dapat mengalami transformasi seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat, paparan terhadap media, serta meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan di Gununghalu tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus sosial yang

ditampilkan oleh kandidat secara langsung, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menafsirkan stimulus tersebut dalam bingkai budaya yang mereka anut.

Jika dibandingkan dengan penelitian Siti Hafisah (2018) yang meneliti persepsi pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo dalam konteks Pilkada Jawa Timur, terdapat kemiripan dalam hal pembentukan persepsi. Di Ponorogo, sebagian pemilih pemula mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin namun masih ada yang menolak dengan alasan normatif termasuk keyakinan agama. Mereka menilai bahwa perempuan lebih cocok menjadi wakil kepala daerah bukan pemimpin utama. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan interpretasi keagamaan masih memainkan peran penting dalam membentuk sikap politik masyarakat. Dalam penelitian ini juga ditemukan namun terdapat kemajuan dalam hal penerimaan terutama dari kelompok pemilih pemula yang menyatakan secara terbuka bahwa mereka siap mendukung pemimpin perempuan selama memiliki kompetensi yang jelas. Sementara itu, penelitian dari Ni Luh Putu *et al.* (2020) memberikan gambaran berbeda karena dilakukan di kota Denpasar dengan pendekatan kuantitatif melalui survei. Dari 300 pemilih pemula, hanya 65 orang yang menyatakan mendukung caleg perempuan, sedangkan sisanya tidak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kandidat perempuan masih rendah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa faktor pendidikan dan keaktifan organisasi sangat memengaruhi persepsi pemilih. Hal ini senada dengan penelitian ini di mana keaktifan dalam organisasi keagamaan seperti Muslimat NU atau Fatayat NU berperan dalam membentuk persepsi positif terhadap perempuan, karena sejak awal masyarakat diperkenalkan dengan figur-figur perempuan yang aktif di ruang publik dan kegiatan sosial.

Meskipun masyarakat Gununghalu masih memegang nilai-nilai tradisional, mereka tidak serta merta menolak kepemimpinan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi bukan semata-mata hasil dari struktur sosial yang mapan, melainkan bisa berubah seiring munculnya figur perempuan yang mampu menampilkan citra positif dan membangun komunikasi yang efektif dengan warga. Artinya, semakin banyak kandidat perempuan yang tampil dengan kualitas baik dan dekat dengan masyarakat, semakin besar peluang perubahan persepsi terjadi secara alami. Namun, perlu diakui bahwa tantangan masih ada dimana nilai-nilai patriarkis yang belum sepenuhnya hilang. Beberapa informan menyebut bahwa masih ada tekanan budaya dari tokoh adat atau tokoh agama yang memandang bahwa perempuan sebaiknya tidak berada di ruang publik. Ini menunjukkan bahwa meskipun persepsi bisa berubah, prosesnya berjalan perlahan dan perlu terus didukung oleh pendekatan edukatif, peningkatan literasi politik, serta penguatan peran perempuan dalam organisasi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan bukan sekadar masalah preferensi individu, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dimana isyarat sosial yang ditangkap dari kandidat, nilai budaya, pengalaman sosial, dan struktur organisasi masyarakat saling berinteraksi. Masyarakat Gununghalu telah menunjukkan kemajuan dalam hal keterbukaan terhadap pemimpin perempuan, namun untuk menciptakan keterwakilan yang lebih adil

dan setara perlu kerja bersama untuk mengubah pandangan dan struktur sosial yang masih membatasi ruang perempuan dalam politik.

SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi pemilih terhadap kandidat perempuan dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Gununghalu terbentuk melalui hasil dari interaksi kompleks antara isyarat sosial yang ditampilkan oleh kandidat, pengaruh budaya lokal yang masih kental dengan nilai-nilai patriarkal, serta pengalaman sosial yang dibentuk oleh lingkungan, organisasi, dan media. Mayoritas pemilih khususnya generasi muda dan mereka yang terlibat dalam organisasi sosial-keagamaan seperti Muslimat NU dan Fatayat NU menunjukkan pandangan yang lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, selama kandidat tersebut menunjukkan kompetensi, kepedulian terhadap masyarakat, dan visi kepemimpinan yang jelas. Mereka menilai bahwa kepemimpinan tidak lagi harus dilihat dari jenis kelamin, melainkan dari kapasitas individu yang ditunjukkan secara nyata. Meskipun terdapat perubahan cara pandang yang cukup progresif di sebagian kelompok, nilai-nilai budaya patriarkal masih memiliki pengaruh yang signifikan, terutama di kalangan generasi tua dan tokoh adat maupun tokoh agama. Pandangan yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin yang lebih “alami” atau “pantaspun” masih sering muncul, sehingga kandidat perempuan tetap menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam proses politik. Persepsi pemilih tidak terbentuk dalam ruang kosong, melainkan sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol sosial seperti penampilan, gaya bicara, dan interaksi sosial kandidat, yang kemudian ditafsirkan dalam bingkai nilai dan norma budaya yang berlaku di lingkungan mereka. Temuan ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya, seperti penelitian Siti Hafshah (2018) di Ponorogo dan Ni Luh Putu *et al.* (2020) di Denpasar, yang sama-sama menunjukkan bahwa persepsi terhadap kandidat perempuan sangat dipengaruhi oleh latar budaya, tingkat pendidikan, serta keterlibatan individu dalam organisasi sosial. Namun, di Gununghalu memperlihatkan kecenderungan yang lebih menjanjikan, karena terdapat kombinasi antara keterbukaan pemilih pemula, peran organisasi masyarakat yang aktif memperkenalkan figur perempuan di ruang publik, serta adanya pengalaman sosial yang mengikis pandangan stereotipis terhadap perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi politik terhadap kandidat perempuan di Gununghalu bukan sekadar refleksi dari preferensi individu, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh dinamika antara isyarat sosial, nilai budaya, dan pengalaman kolektif masyarakat. Perubahan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan memang sedang berlangsung, namun berjalan perlahan dan tetap menghadapi hambatan struktural.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar berbagai pihak terkait termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan tokoh-tokoh lokal mengambil peran aktif dalam membangun iklim politik yang lebih inklusif terhadap perempuan. Upaya

ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan politik yang sensitif gender dan berperspektif kesetaraan, yang tidak hanya ditujukan kepada calon pemimpin perempuan, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai pemilih yang kritis guna membongkar stereotip gender serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya keterwakilan politik yang adil. Di samping itu, penguatan kapasitas perempuan di tingkat lokal juga perlu diperkuat melalui program pemberdayaan, pelatihan kepemimpinan, dan keterlibatan aktif dalam organisasi sosial serta didukung oleh dorongan moral dan kultural dari tokoh agama maupun tokoh adat agar terjadi perubahan cara pandang kolektif terhadap peran perempuan di ruang publik. Kandidat perempuan juga disarankan untuk mengembangkan strategi komunikasi politik yang kontekstual, adaptif terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat secara efektif. Untuk menciptakan perubahan yang lebih sistemik dan berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi antarsektor yang mendorong terciptanya ruang partisipasi yang adil, menghilangkan hambatan kultural yang membatasi perempuan, serta memperkuat ekosistem politik yang memungkinkan perempuan tampil sebagai pemimpin yang setara dan bermakna dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.1127>
- Aulya, R. N. (2022). *Perjuangan Perempuan Indonesia Dalam Memperoleh Kuota Perempuan Dalam Politik*. <https://www.researchgate.net/publication/359993686>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Fadhli, A. (2014). *TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF FEMINISME*.
- Hafsah, S., & Sari, M. M. K. (2018). PERSEPSI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(3).
- Haryanti, A., & Artikel, R. (2024). *Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029*. 15(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v15i1.4208>
- Indah Mar'atus Sholichah, Dyah Mustika Putri, & Akmal Fikri Setiaji. (2023). Representasi Budaya Banyuwangi Dalam Banyuwangi Ethno Carnival: Pendekatan Teori Representasi Stuart Hall. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 32–42. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.332>
- Kushandajani, K., Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Martini, R. (2023). Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa: Studi Perilaku

- Memilih dari Dimensi Sosiologi dan Psikologi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 269–286. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.269-286>
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis* (second edition). SAGE Publications.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Rahel Putriani, Ghea Clara Salsabila, Rachmad Aldi, & Opi Andriani. (2024). Persepsi Sosial/Masyarakat Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Secara Fisik. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 132–140. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i2.573>
- Rohmah, N. S., Rahayu, S. D., Fitri, N., & Ramadhani, I. (2025). URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA YUDIKATIF. In *JISIP-UNJA* (Vol. 9, Issue 1).
- Sastrawaty, N., Fakultas, D., Dan, U., Uin, F., & Makassar, A. (2023). PRO-KONTRA PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FEMINISME MUSLIM. In *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipakalebbi* (Vol. 7, Issue 1).
- Suciptawati, N. L. P., Sukarsa, I. K. G., & Kencana, E. N. (2020). Tanggapan Pemilih Pemula Terhadap Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif (PILEG) 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 150. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28475>
- van Dijk, L., & Kiverstein, J. (2021). Direct perception in context: radical empiricist reflections on the medium. *Synthese*, 198(9), 8389–8411. <https://doi.org/10.1007/s11229-020-02578-3>
- Victorya Pandiangan, L. (2017). *PEREMPUAN POLITISI MINANGKABAU DALAM DUNIA POLITIK : STUDI TENTANG ALASAN PEREMPUAN MEMAKNAI POLITIK*.
- Yıldırım, H. M., Güvenç, A., & Can, B. (2025). Reporting Quality in Qualitative Research Using Artificial Intelligence and the COREQ Checklist: A Systematic Review of Tourism Literature. *International Journal of Qualitative Methods*, 24. <https://doi.org/10.1177/16094069251351487>